



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 menyatakan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 menyatakan rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan peta jabatan masing-masing organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk setiap jenjang jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2020 dengan Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ke dalam peta jabatan di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 dengan Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1331);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:

- a. Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
- c. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- d. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
- e. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
- f. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- g. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
 - h. Peta Jabatan di Lingkungan Inspektorat;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan pedoman dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KETIGA : Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain sebagai berikut:
- a. Penyusunan formasi pegawai;
 - b. Pengadaan pegawai;
 - c. Pengangkatan dalam jabatan;
 - d. Perencanaan karier; dan
 - e. Pelaksanaan kelas jabatan.
- KEEMPAT : Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Keputusan ini setiap unit kerja di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri Koordinator.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2023
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

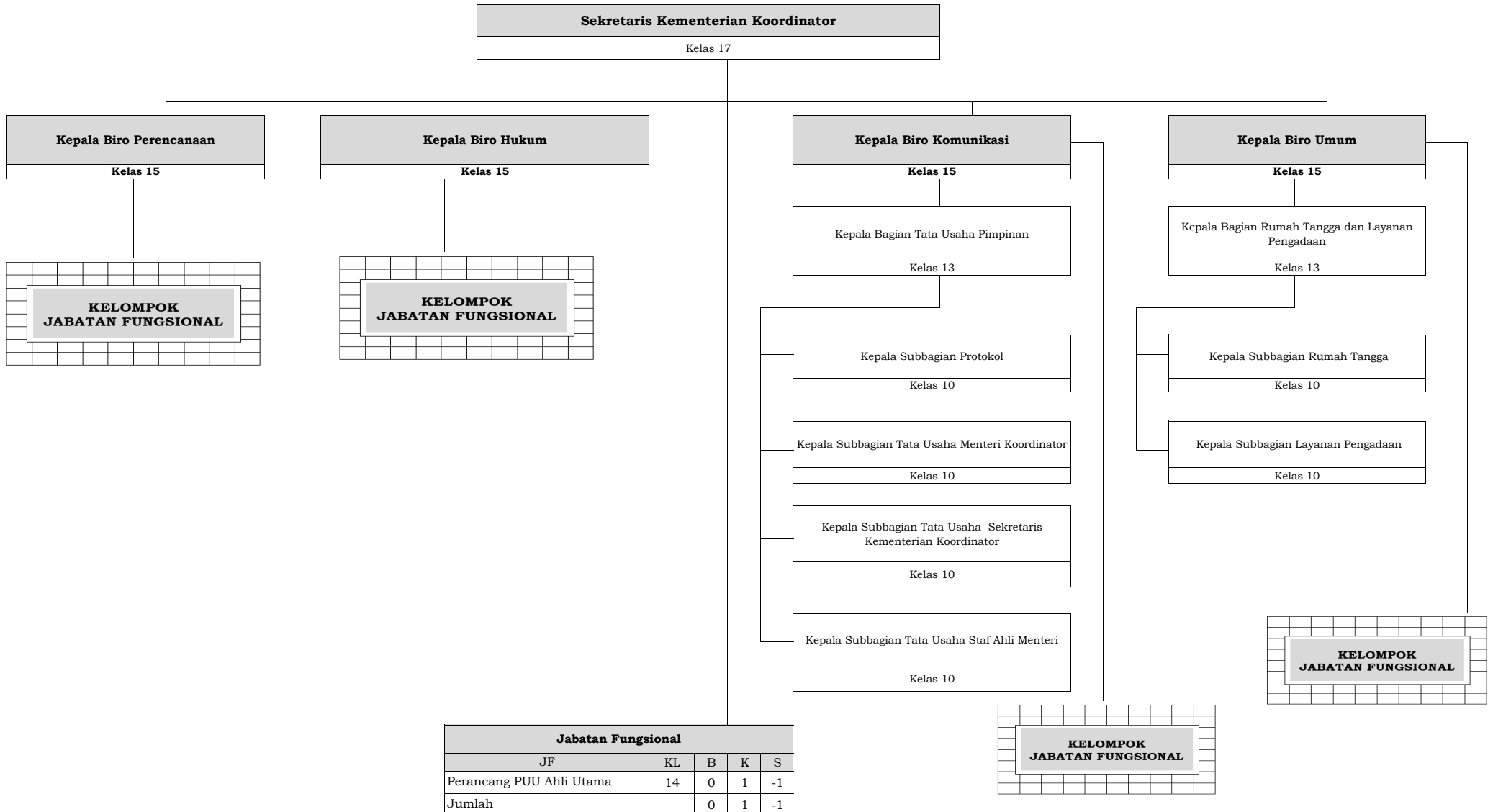
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,




Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

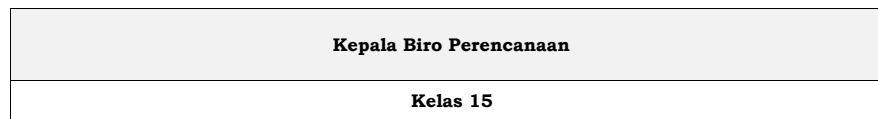
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI
NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG
PETA JABATAN LINGKUP KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kementerian Koordinator



Jabatan Fungsional				
JF	KL	B	K	S
Perancang PUU Ahli Utama	14	0	1	-1
Jumlah		0	1	-1

**B. Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator,
Biro Perencanaan**

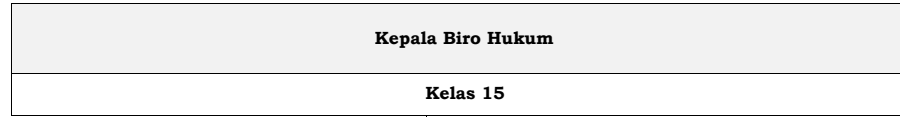


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14	0	1	-1
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	9	10	-1
Kelas 9			
Kelas 8	11	12	-1
Kelas 7	11	14	-3
Kelas 6	0	2	-2
JUMLAH	35	43	-8

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Perencana Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	2	0
Perencana Ahli Muda (Hasil PB)	10	5	6	-1
Perencana Ahli Pertama	8	5	6	-1
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4	4	0
Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	1	1	0
Arsiparis Ahli Muda (Hasil PB)	10	2	2	0
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	1	0
JUMLAH		23	26	-3

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Perencanaan	7	1	1	0
Analisis Data dan Informasi	7	2	2	0
Analisis Tata Usaha	7	0	1	-1
Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	1	1	0
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	3	3	0
Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	1	1	0
Analisis Materi Sidang	7	3	3	0
Penyusun Bahan Kebijakan	7	0	1	-1
Penyusun Laporan Keuangan	7	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
JUMLAH		11	15	-4

C. Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator, Biro Hukum



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	4	3	1
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	8	8	0
Kelas 9			
Kelas 8	12	16	-4
Kelas 7	9	12	-3
Kelas 6			
JUMLAH	34	40	-6

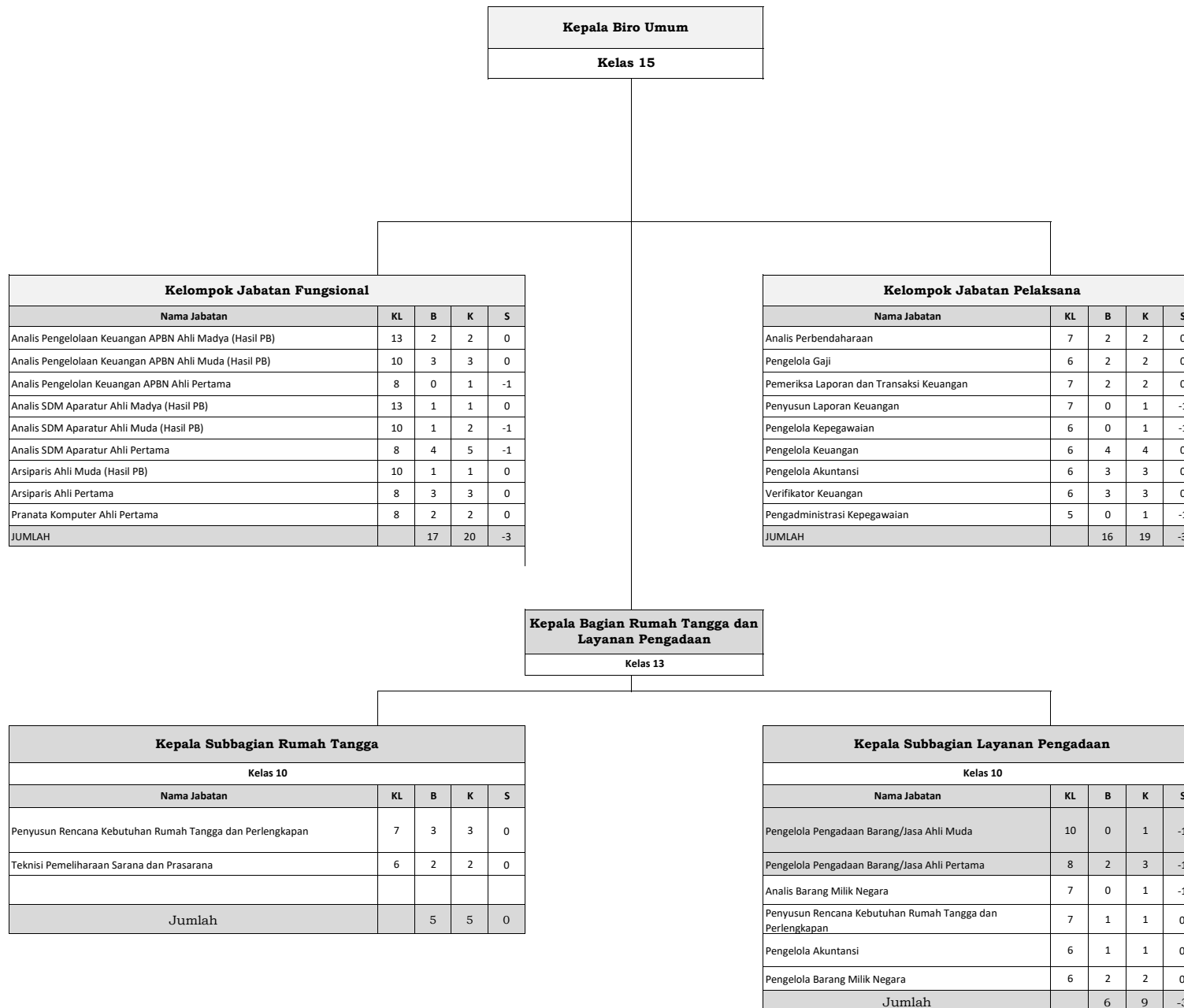
Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Perancang PUU Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Perancang PUU Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Perancang PUU Ahli Pertama	8	3	3	0
Analisis Hukum Ahli Muda (Hasil PB)	10	3	3	0
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	2	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	2	1
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil PB)	10	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4	6	-2
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Arsiparis Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penerjemah Ahli Pertama	8	2	2	0
JUMLAH		24	27	-3

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Hukum	7	1	1	0
Analisis Kerja Sama	7	2	2	0
Analisis Organisasi	7	2	2	0
Analisis Tata Laksana	7	1	1	0
Analisis Tata Usaha	7	0	1	-1
Analisis Monev dan Pelaporan	7	1	2	-1
Penyusun Bahan Kebijakan	7	2	2	0
Penyusun Laporan Keuangan	7	0	1	-1
JUMLAH		9	12	-3

D. Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator, Biro Komunikasi

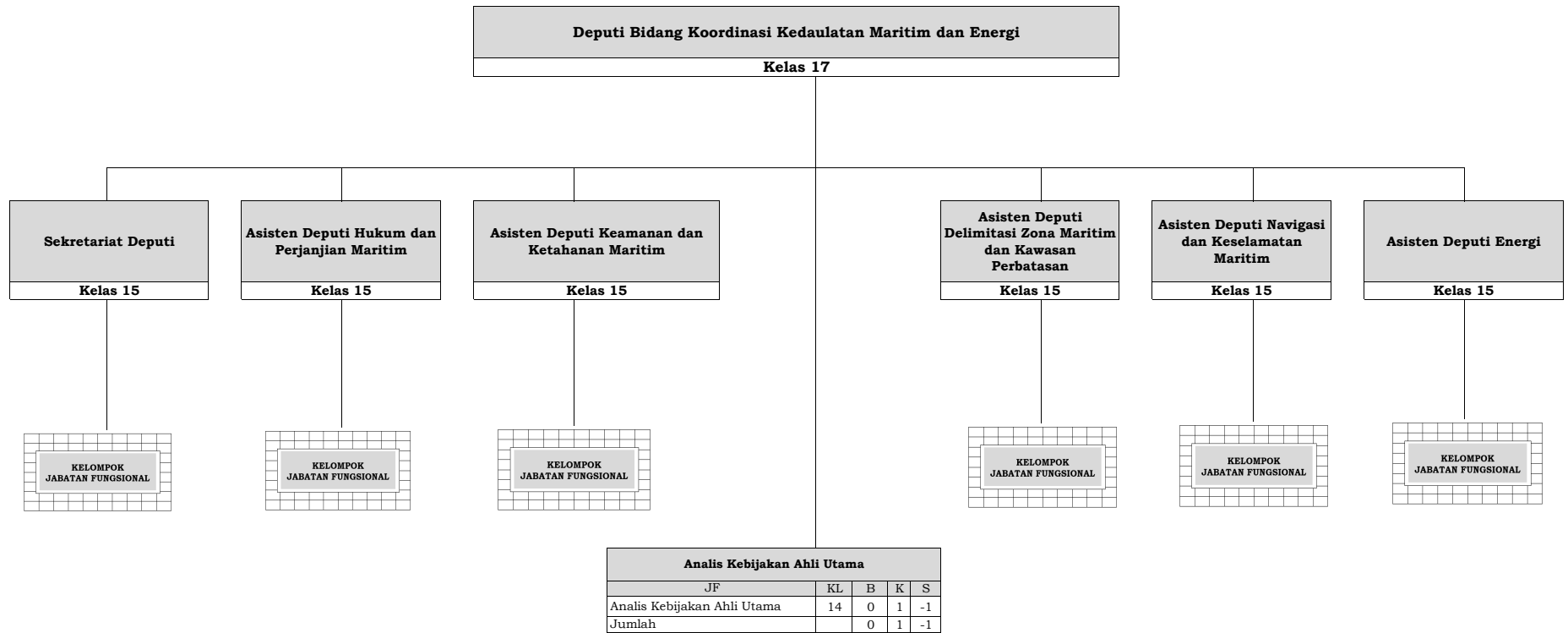


E. Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator, Biro Umum



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	6	6	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	5	7	-2
Kelas 9			
Kelas 8	11	14	-3
Kelas 7	10	12	-2
Kelas 6	15	16	-1
Kelas 5	0	1	-1
JUMLAH	48	57	-9

**F. Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi**



G. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Sekretariat Deputy

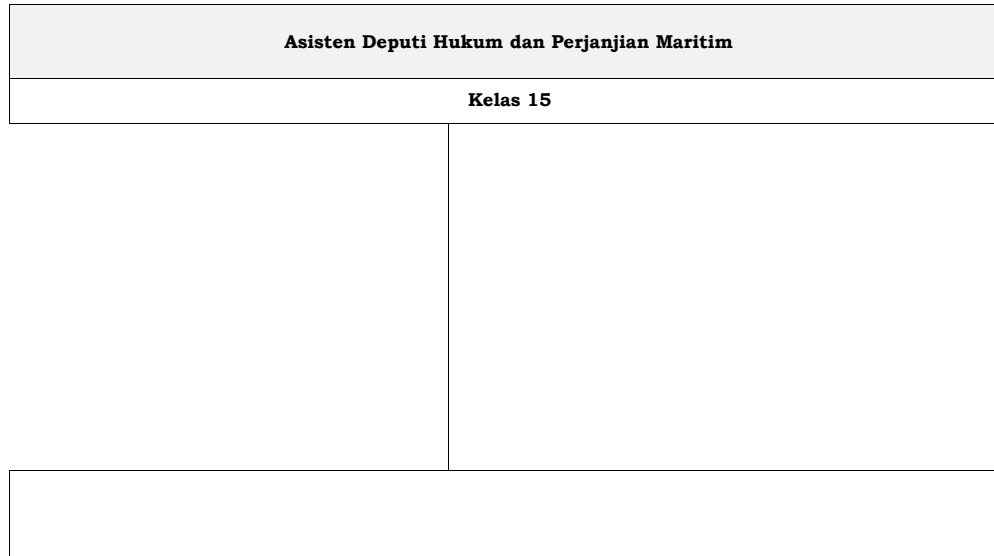


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	0	1	-1
Kelas 14	0	1	-1
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	4	5	-1
Kelas 9			
Kelas 8	4	5	-1
Kelas 7	1	3	-2
Kelas 6			
JUMLAH	11	17	-6

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Perencana Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Perencana Ahli Muda (Hasil PB)	10	3	3	0
Perencana Ahli Pertama	8	1	2	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Arsiparis Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	2	2	0
JUMLAH		10	12	-2

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Tata Usaha	7	0	1	-1
Penyusunan Laporan Keuangan	7	0	1	-1
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
JUMLAH		1	3	-2

H. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim

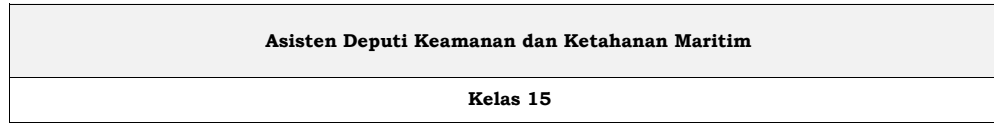


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	1	1	0
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11	0	1	-1
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	1	2	-1
Kelas 7	4	5	-1
Kelas 6			
JUMLAH	7	12	-5

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	2	-1
Analisis Hukum Ahli Madya	11	0	1	-1
JUMLAH		2	6	-4

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	0	1	-1
Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7	1	1	0
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Analisis Permasalahan Hukum	7	1	1	0
Penyusunan Bahan kebijakan	7	1	1	0
JUMLAH		4	5	-1

I. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim

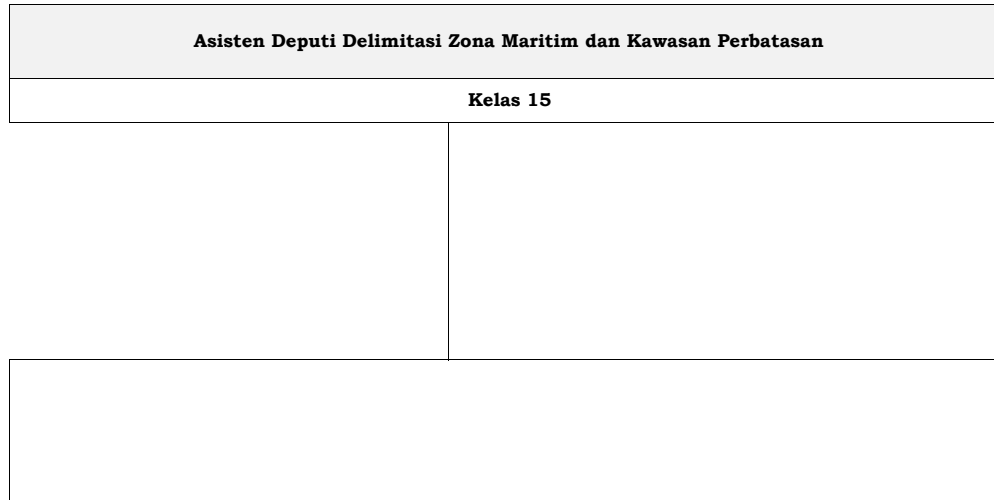


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	0	1	-1
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	1	3	-2
Kelas 7	3	3	0
Kelas 6			
JUMLAH	7	11	-4

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	3	-2
JUMLAH		4	7	-3

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Analisis Keamanan	7	1	1	0
JUMLAH		3	3	0

J. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan

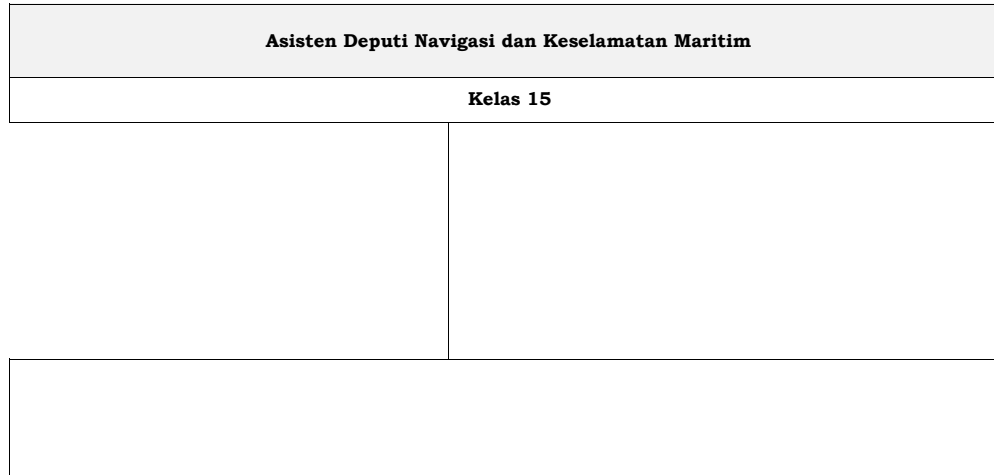


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	0	1	-1
Kelas 14			
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	2	6	-4
Kelas 7	3	1	2
Kelas 6			
JUMLAH	7	12	-5

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	4	-2
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	2	-2
JUMLAH		4	10	-6

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	1	0	1
Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	1	1	0
Penyusunan Bahan Kebijakan	7	1	0	1
				0
JUMLAH		3	1	2

K. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	2	-2
Kelas 9			
Kelas 8	3	4	-1
Kelas 7	2	1	1
Kelas 6			
JUMLAH	9	11	-2

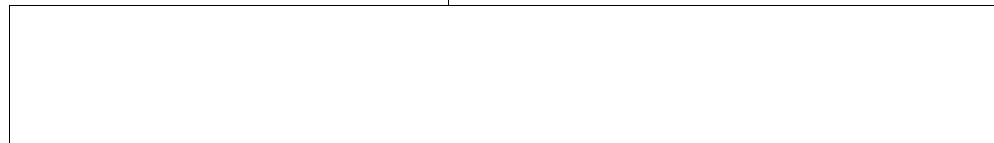
Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	4	-1
JUMLAH		6	9	-3

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Pengelola Data	6	1	1	0
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	0	1
				0
JUMLAH		2	1	1

L. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Asisten Deputy Energi



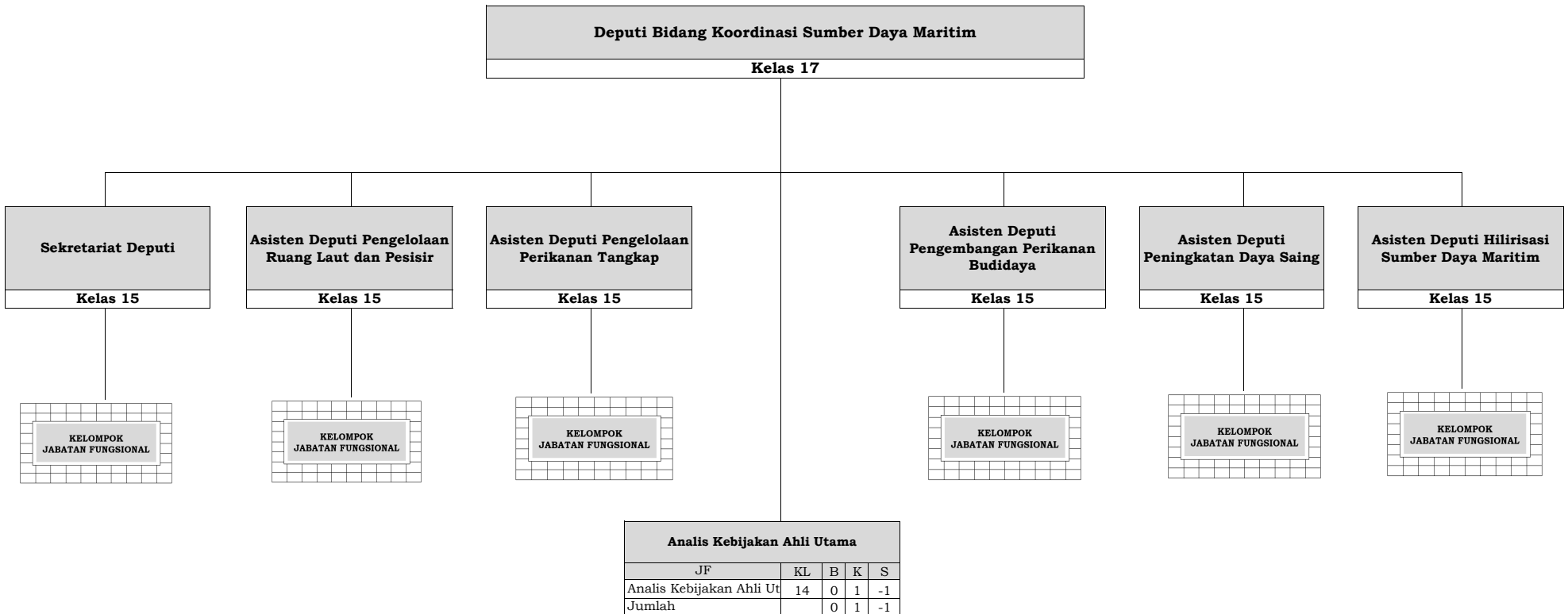
Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			0
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			0
Kelas 10	0	2	-2
Kelas 9			0
Kelas 8	2	5	-3
Kelas 7	3	1	2
Kelas 6			0
JUMLAH	8	12	-4



Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	5	-3
JUMLAH		4	10	-6

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	1	0	1
Analisis Industri	7	1	1	0
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	0	1
JUMLAH		3	1	2

**M. Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim**



**N. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim,
Sekretariat Deputy**

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Kelas 15

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	0	1	-1
Kelas 14	0	1	-1
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	2	3	-1
Kelas 9			
Kelas 8	4	6	-2
Kelas 7	3	5	-2
Kelas 6	1	2	-1
Kelas 5	0	1	-1
JUMLAH	12	21	-9

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Perencana Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Perencana Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Arsiparis Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	0	1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	2	0
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	2	2	0
JUMLAH		8	12	-4

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Analisis Tata Usaha	7	1	2	-1
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	1	2	-1
Pengelola Data	6	1	1	0
Pengadministrasian Persuratan	5	0	1	-1
JUMLAH		4	7	-3

O. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

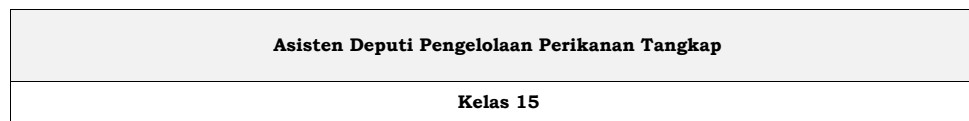
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
Kelas 15

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	3	4	-1
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	2	-2
Kelas 9			
Kelas 8	4	4	0
Kelas 7	1	2	-1
Kelas 6			
JUMLAH	9	13	-4

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	4	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4	4	0
JUMLAH		7	10	-3

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
Analisis Data dan Informasi	7	0	1	-1
JUMLAH		1	2	-1

P. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap

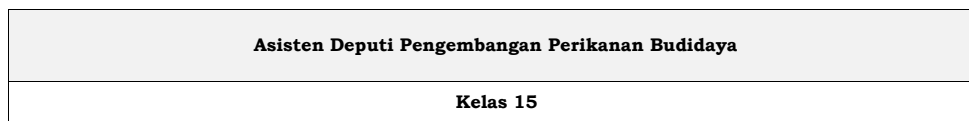


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			
Kelas 10	0	3	-3
Kelas 9			
Kelas 8	3	3	0
Kelas 7	1	2	-1
Kelas 6			
JUMLAH	7	12	-5

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	3	-3
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	3	0
JUMLAH		5	9	-4

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Potensi Kelautan	7	1	2	-1
JUMLAH		1	2	-1

Q. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya

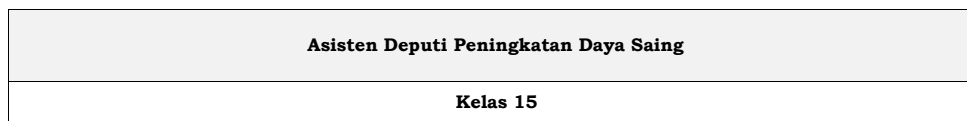


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	3	-3
Kelas 9			
Kelas 8	3	3	0
Kelas 7	1	2	-1
Kelas 6			
JUMLAH	8	12	-4

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	3	-3
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	3	0
JUMLAH		6	9	-3

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Perikanan Budidaya	7	0	1	-1
Analisis Potensi Kelautan	7	1	1	0
JUMLAH		1	2	-1

R. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	2	2	0
Kelas 7	3	4	-1
Kelas 6			
JUMLAH	9	11	-2

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	2	0
JUMLAH		5	6	-1

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Penyusun Bahan Kebijakan	7	3	3	0
Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	7	0	1	-1
JUMLAH		3	4	-1

S. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Asisten Deputy Hilirisasi Sumber Daya Maritim

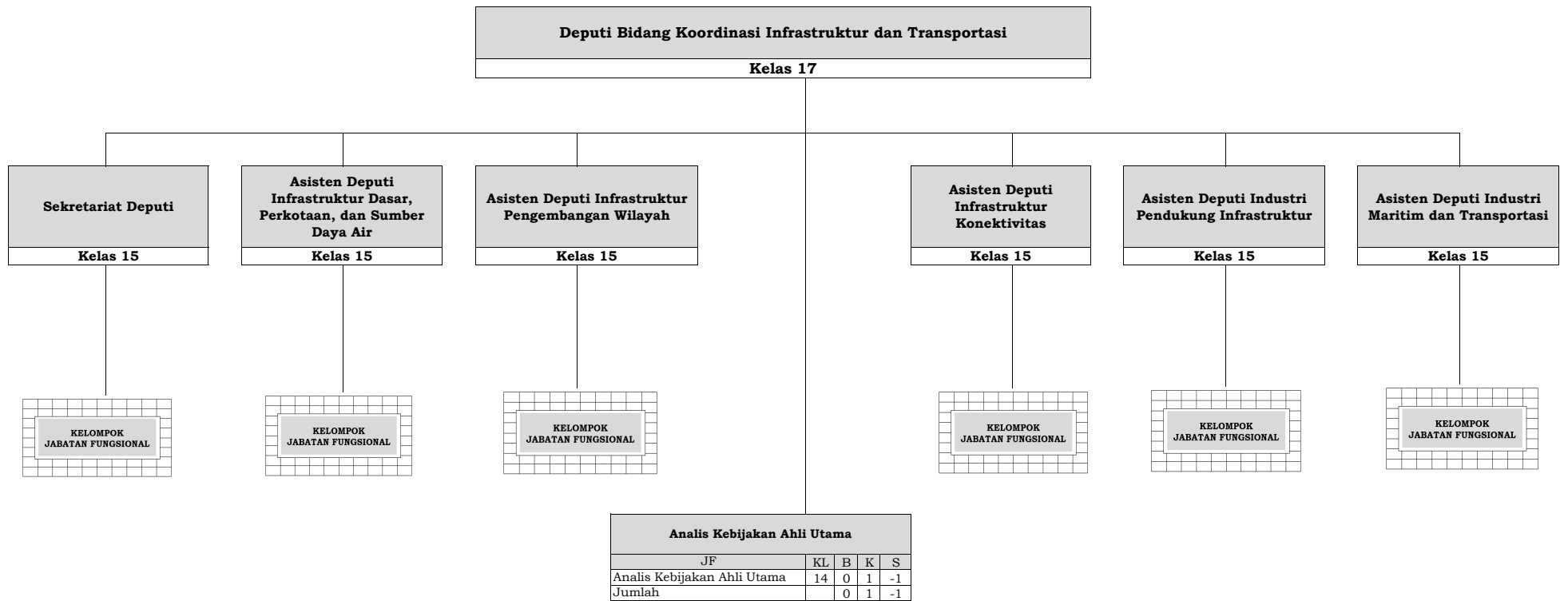


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	3	-1
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	3	3	0
Kelas 7	2	3	-1
Kelas 6			
JUMLAH	8	11	-3

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	3	0
JUMLAH		5	7	-2

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Penyusun Bahan Kebijakan	7	2	2	0
Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	7	0	1	-1
JUMLAH		2	3	-1

**T. Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi**



**U. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi,
Sekretariat Deputy**

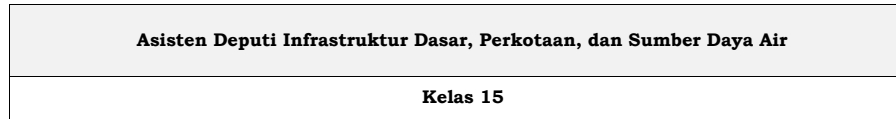
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
Kelas 15

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14	0	1	-1
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	3	4	-1
Kelas 9			
Kelas 8	4	7	-3
Kelas 7	3	4	-1
Kelas 6	0	2	-2
JUMLAH	13	21	-8

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Perencana Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Perencana Ahli Muda (Hasil PB)	10	2	3	-1
Perencana Ahli Pertama	8	2	4	-2
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Arsiparis Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	2	2	0
JUMLAH		9	14	-5

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Perencanaan	7	2	2	0
Analisis SDM Aparatur	7	0	1	-1
Analisis Tata Usaha	7	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
JUMLAH		3	5	-2

**V. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi,
Asisten Deputy Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air**



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	3	-1
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	2	3	-1
Kelas 7	4	4	0
Kelas 6			
JUMLAH	9	12	-3

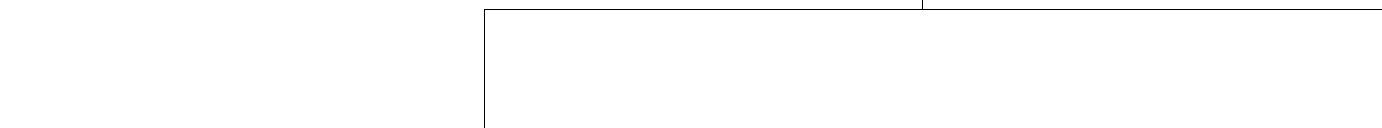
Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	3	-1
JUMLAH		4	7	-3

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Infrastruktur	7	3	3	0
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
JUMLAH		4	4	0

W. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah

Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah
Kelas 15

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	2	3	-1
Kelas 7	3	3	0
Kelas 6			
JUMLAH	9	11	-2



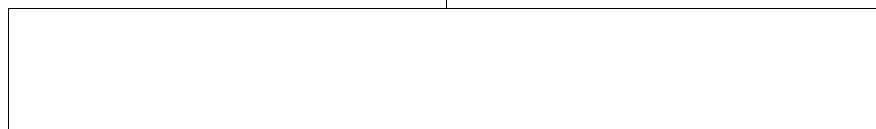
Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	3	-1
JUMLAH		5	7	-2

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Penyusunan Bahan Kebijakan	7	1	1	0
Analisis Infrastruktur	7	1	1	0
JUMLAH		3	3	0

X. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Asisten Deputy Infrastruktur Konektivitas



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	0	1	-1
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	1	3	-2
Kelas 7	4	4	0
Kelas 6			
JUMLAH	8	12	-4



Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	3	-2
JUMLAH		4	7	-3

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Penyusun Bahan Kebijakan	7	3	3	0
JUMLAH		4	4	0

Y. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Asisten Deputy Industri Pendukung Infrastruktur



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	1	2	-1
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	2	3	-1
Kelas 7	3	3	0
Kelas 6			
JUMLAH	7	11	-4

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	2	-1
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	3	-1
JUMLAH		3	7	-4

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
Analisis Infrastruktur	7	1	1	0
JUMLAH		3	3	0

Z. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Asisten Deputi Industri Industri Maritim dan Transportasi

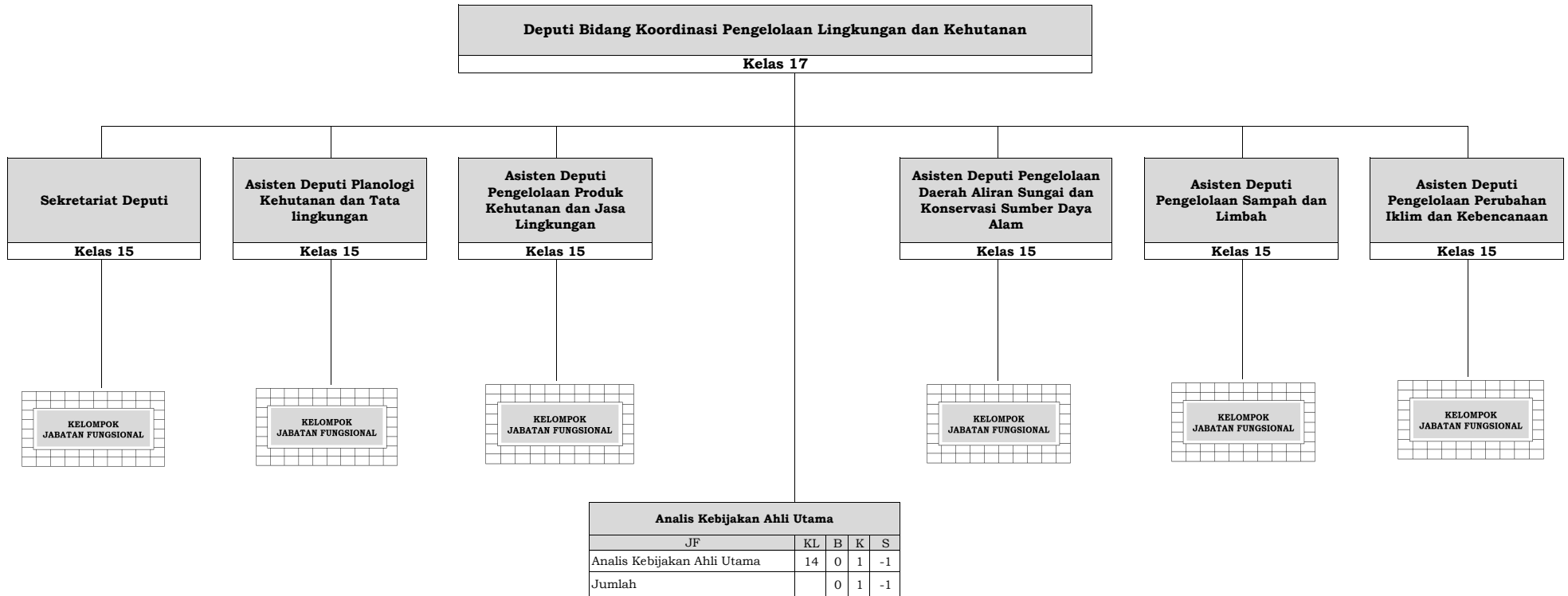


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	3	3	0
Kelas 7	2	2	0
Kelas 6			
JUMLAH	9	10	-1

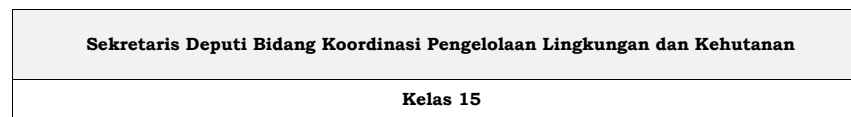
Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	3	0
JUMLAH		6	7	-1

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Infrastruktur	7	1	1	0
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
JUMLAH		2	2	0

**AA. Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan**



**BB. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan,
Sekretariat Deputy**



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14	0	1	-1
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			
Kelas 10	3	3	0
Kelas 9			
Kelas 8	4	5	-1
Kelas 7	2	4	-2
Kelas 6			
JUMLAH	12	17	-5

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	1	-1
Perencana Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Perencana Ahli Muda (Hasil PB)	10	2	2	0
Perencana Ahli Pertama	8	1	2	-1
Arsiparis Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Arsiparis Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	3	0
JUMLAH		9	11	-2

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Perencanaan	7	0	1	-1
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Analisis Tata Usaha	7	0	1	-1
JUMLAH		2	4	-2

**CC. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan,
Asisten Deputy Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

Asisten Deputy Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kelas 15

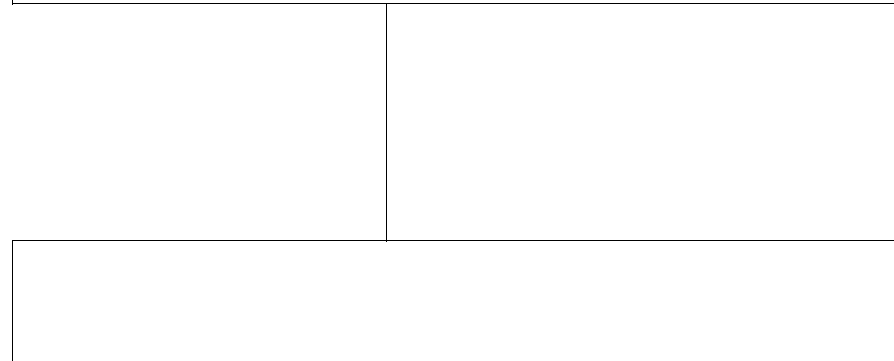
Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10			
Kelas 9			
Kelas 8	3	3	0
Kelas 7	1	3	-2
Kelas 6			
JUMLAH	8	10	-2

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	3	0
JUMLAH		6	6	0

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	0	1	-1
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0	1	-1
Penyusunan Bahan Kebijakan	7	1	1	0
JUMLAH		1	3	-2

DD. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Asisten Deputy Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan

Asisten Deputy Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan
Kelas 15

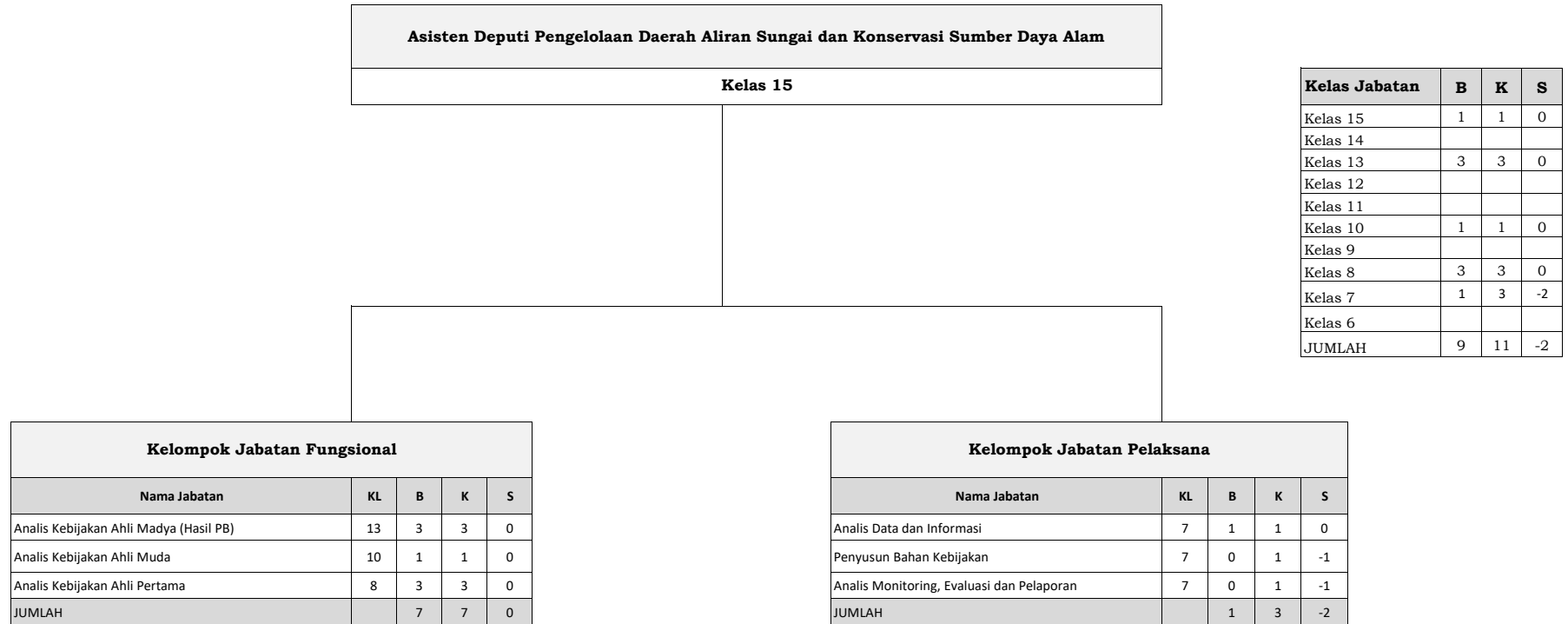


Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4	4	0
JUMLAH		7	7	0

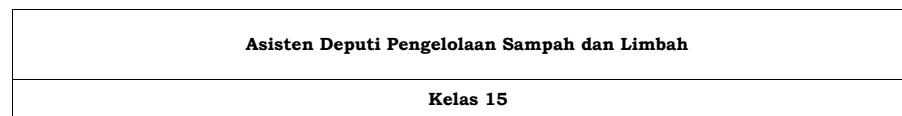
Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	0	1	-1
Penyusun Bahan Kebijakan	7	2	2	0
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0	1	-1
JUMLAH		2	4	-2

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	0	1	-1
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10			
Kelas 9			
Kelas 8	4	4	0
Kelas 7	2	4	-2
Kelas 6			
JUMLAH	9	12	-3

**EE. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan,
Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam**



**FF. Peta Jabatan di LingkunganDeputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan,
Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah**

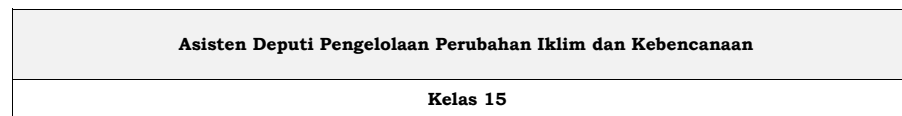


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	2	3	-1
Kelas 7	2	3	-1
Kelas 6			
JUMLAH	8	11	-3

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	3	-1
JUMLAH		5	7	-2

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0	1	-1
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
JUMLAH		2	3	-1

**GG. Peta Jabatan di LingkunganDeputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan,
Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan**

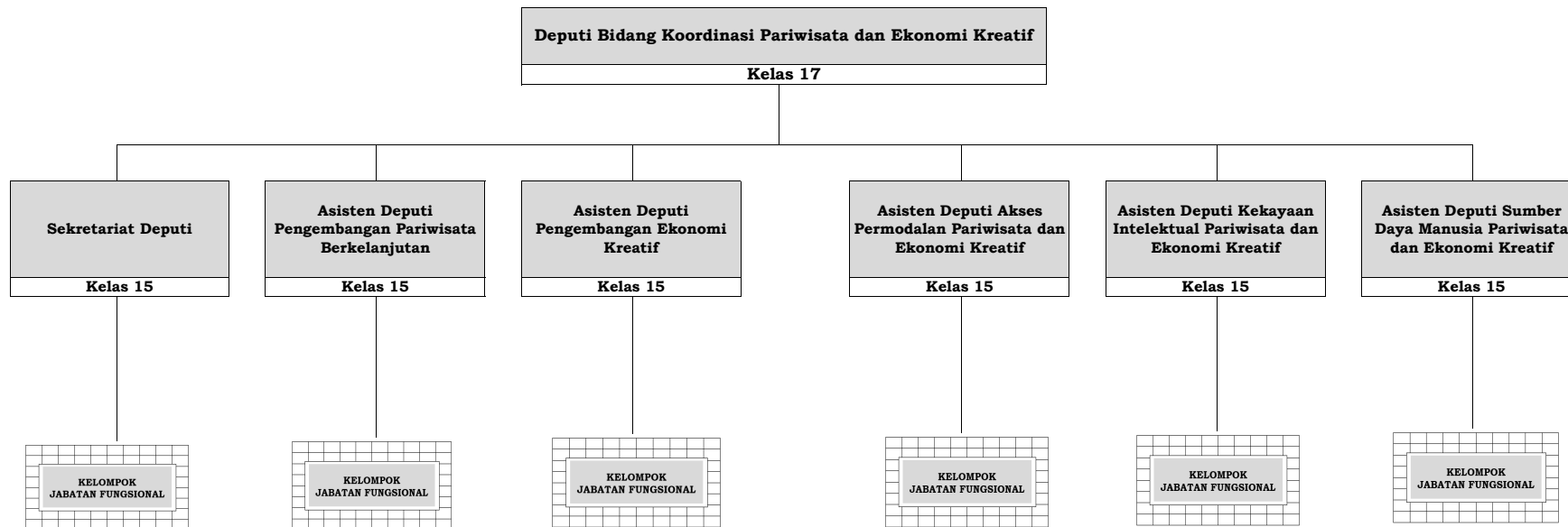


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	3	-1
Kelas 12	1	1	0
Kelas 11			
Kelas 10	1	1	0
Kelas 9			
Kelas 8	3	4	-1
Kelas 7	1	3	-2
Kelas 6			
JUMLAH	9	13	-4

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	4	-1
JUMLAH		7	9	-2

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	0	1	-1
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0	1	-1
JUMLAH		1	3	-2

**HH. Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**



II. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Deputy

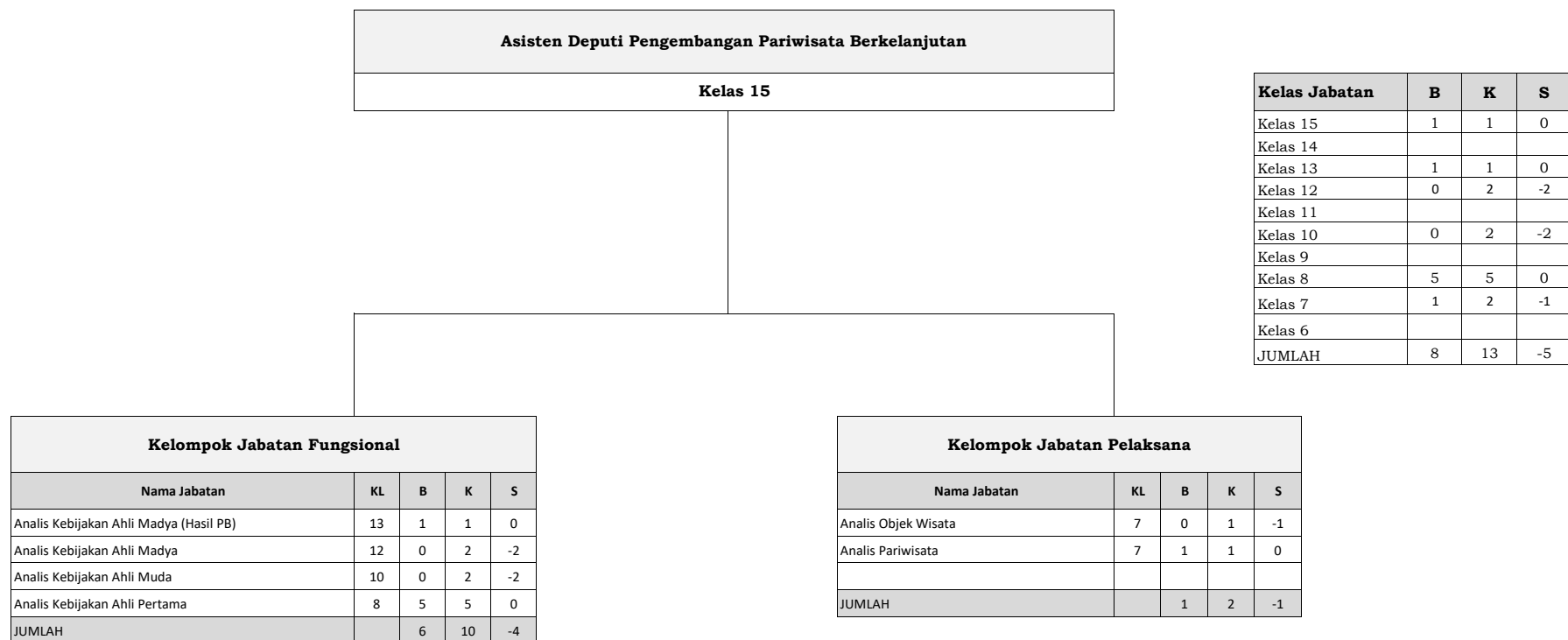
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kelas 15

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			
Kelas 10	2	3	-1
Kelas 9	0	1	-1
Kelas 8	1	3	-2
Kelas 7	3	9	-6
Kelas 6	0	1	-1
JUMLAH	9	21	-12

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	1	-1
Perencana Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Perencana Ahli Muda (Hasil PB)	10	2	2	0
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	1	1	0
Arsiparis Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1
JUMLAH		5	10	-5

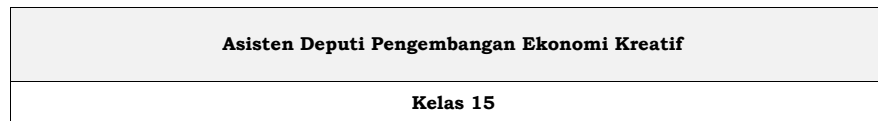
Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	0	1	-1
Analisis Perencanaan	7	1	1	0
Penyusun Bahan Kebijakan	7	2	1	1
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0	2	-2
Analisis SDM Aparatur	7	0	1	-1
Analisis Tata Usaha	7	0	1	-1
Analisis Protokol	7	0	1	-1
Penyusun Laporan Keuangan	7	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
JUMLAH		3	10	-7

**JJ. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan**



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	1	1	0
Kelas 12	0	2	-2
Kelas 11			
Kelas 10	0	2	-2
Kelas 9			
Kelas 8	5	5	0
Kelas 7	1	2	-1
Kelas 6			
JUMLAH	8	13	-5

**KK. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif**

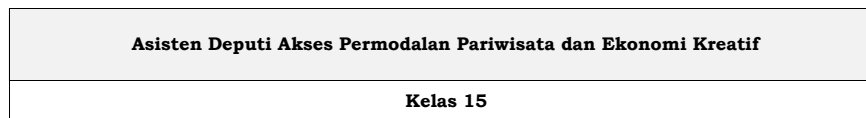


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	0	1	-1
Kelas 14			
Kelas 13	2	3	-1
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	2	-2
Kelas 9			
Kelas 8	2	3	-1
Kelas 7	1	3	-2
Kelas 6			
JUMLAH	5	12	-7

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	3	-1
JUMLAH		4	8	-4

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Ekonomi Kreatif	7	0	2	-2
Analisis Pariwisata	7	1	1	0
JUMLAH		1	3	-2

**LL. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

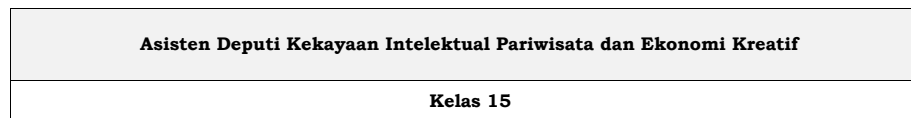


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	3	-1
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	2	-2
Kelas 9			
Kelas 8	3	4	-1
Kelas 7	0	2	-2
Kelas 6			
JUMLAH	6	12	-6

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	4	-1
JUMLAH		5	9	-4

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	7	0	1	-1
Analisis Pariwisata	7	0	1	-1
JUMLAH		0	2	-2

**MM. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

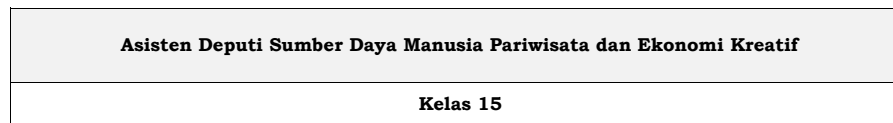


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	0	1	-1
Kelas 14			
Kelas 13	1	1	0
Kelas 12	0	2	-2
Kelas 11			
Kelas 10	0	2	-2
Kelas 9			
Kelas 8	1	4	-3
Kelas 7	2	3	-1
Kelas 6			
JUMLAH	4	13	-9

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	3	-2
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1
JUMLAH		2	9	-7

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Penyusun Bahan Kebijakan	7	2	1	1
Analisis Kekayaan Intelektual	7	0	1	-1
Analisis Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	7	0	1	-1
JUMLAH		2	3	-1

**NN. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Asisten Deputy Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

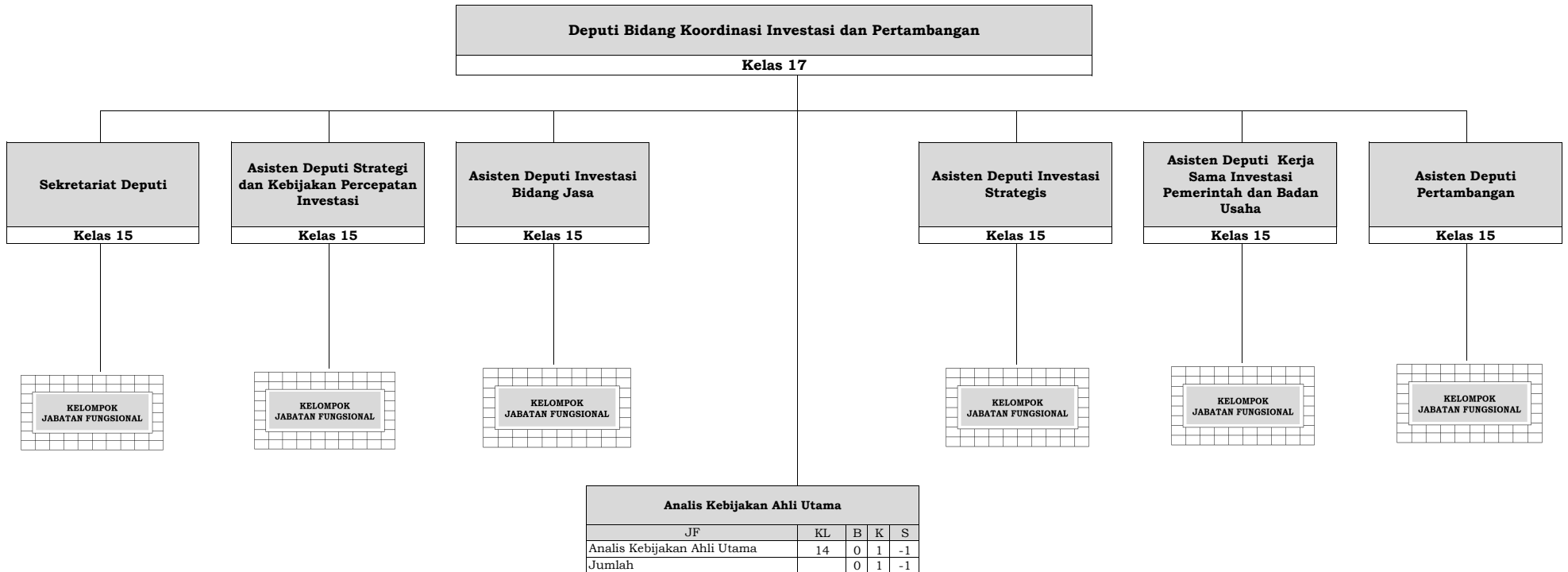


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	3	-1
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	2	-2
Kelas 9			
Kelas 8	1	3	-2
Kelas 7	3	4	-1
Kelas 6			
JUMLAH	7	13	-6

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	3	-2
JUMLAH		3	8	-5

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Analisis Potensi Kelautan	7	1	1	0
Analisis Pariwisata	7	0	1	-1
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
JUMLAH		3	4	-1

**OO. Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**



**PP. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan,
Sekretariat Deputy**

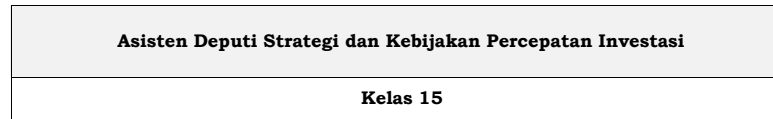


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	0	1	-1
Kelas 14	0	1	-1
Kelas 13	1	1	0
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			
Kelas 10	3	5	-2
Kelas 9			
Kelas 8	4	6	-2
Kelas 7	1	3	-2
Kelas 6			
JUMLAH	9	18	-9

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Perencana Ahli Madya (Hasil PB)	13	1	1	0
Perencana Ahli Muda (Hasil PB)	10	2	2	0
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	1	2	-1
Arsiparis Ahli Muda (Hasil PB)	10	1	1	0
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	3	0
JUMLAH		8	13	-5

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0	1	-1
Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
Penyusun Laporan Keuangan	7	0	1	-1
JUMLAH		1	3	-2

**QQ. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan,
Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi**

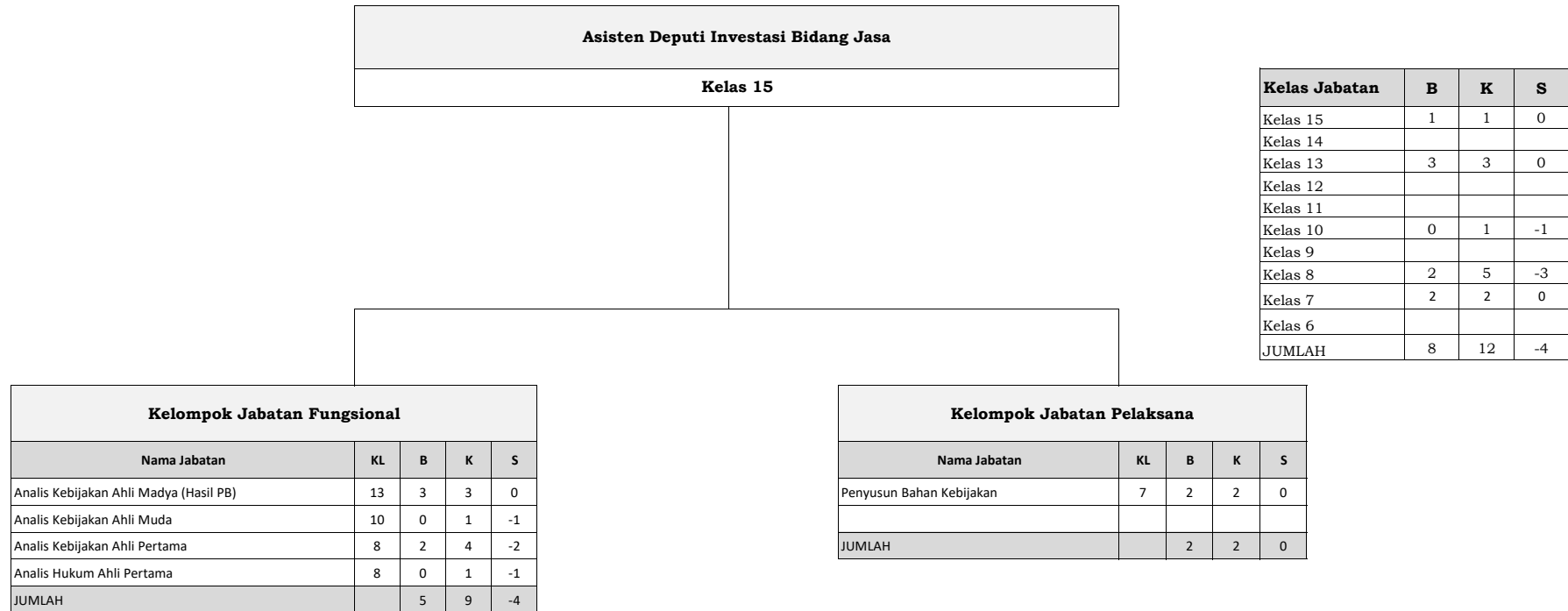


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	3	5	-2
Kelas 7	1	1	0
Kelas 6			
JUMLAH	7	11	-4

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	5	-2
JUMLAH		5	9	-4

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
JUMLAH		1	1	0

**RR. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan,
Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa**



**SS. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan,
Asisten Deputy Investasi Strategis**



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	2	0
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	2	7	-5
Kelas 7	4	4	0
Kelas 6			
JUMLAH	9	16	-7

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	6	-4
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1
JUMLAH		4	11	-7

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Penyusun Bahan Kebijakan	7	1	1	0
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Analisis Kerjasama dan Permodalan	7	1	1	0
Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	7	1	1	0
JUMLAH		4	4	0

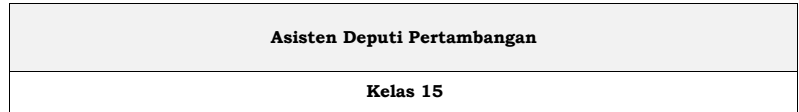
**TT. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan,
Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha**

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	5	-2
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1
JUMLAH		6	10	-4

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12			
Kelas 11			
Kelas 10	0	1	-1
Kelas 9			
Kelas 8	3	6	-3
Kelas 7			
Kelas 6			
JUMLAH	7	11	-4

**UU. Peta Jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan,
Asisten Deputy Pertambangan**

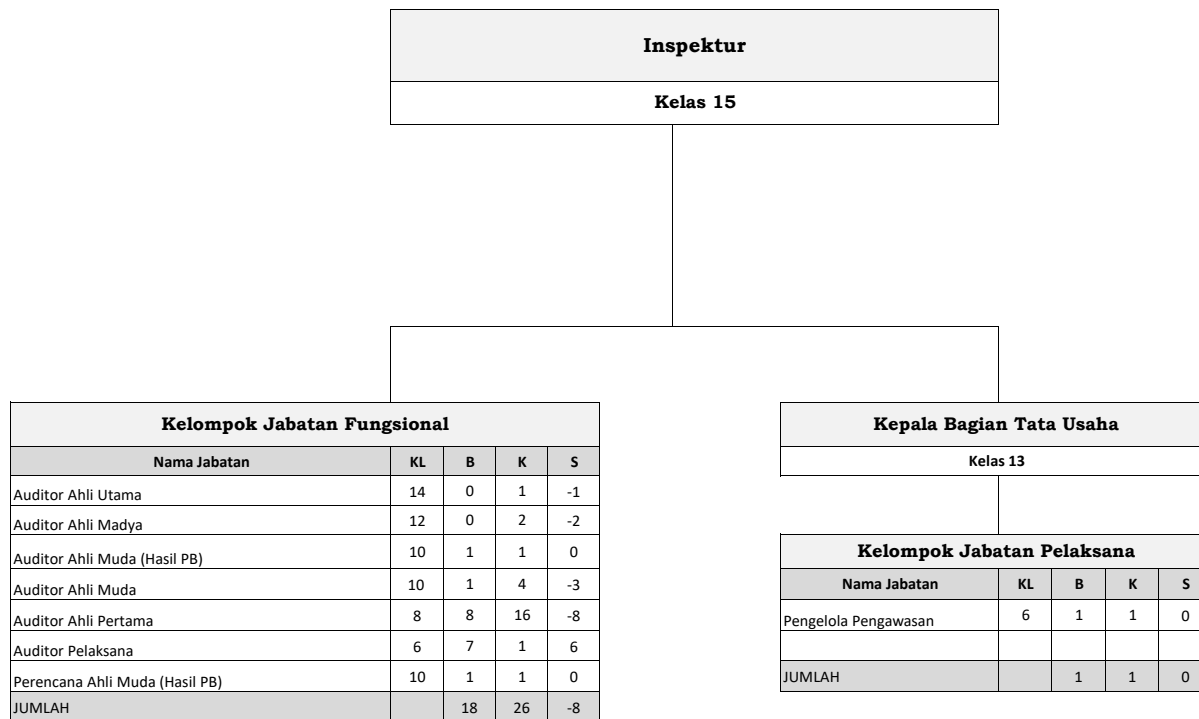


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14			
Kelas 13	2	3	-1
Kelas 12	0	1	-1
Kelas 11			
Kelas 10	1	1	0
Kelas 9			
Kelas 8	5	6	-1
Kelas 7	1	1	0
Kelas 6			
JUMLAH	10	13	-3

Kelompok Jabatan Fungsional				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil PB)	13	2	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5	6	-1
JUMLAH		8	11	-3

Kelompok Jabatan Pelaksana				
Nama Jabatan	KL	B	K	S
Analisis Industri	7	1	1	0
JUMLAH		1	1	0

VV. Peta Jabatan di Lingkungan Inspektorat



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14	0	1	-1
Kelas 13	1	1	0
Kelas 12	0	2	-2
Kelas 11			
Kelas 10	3	6	-3
Kelas 9			
Kelas 8	8	16	-8
Kelas 7			
Kelas 6	8	2	6
JUMLAH	21	29	-8

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002